



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008

- tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
 7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis;
 8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan/atau diterima oleh Komisi dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
6. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
7. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
8. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan klasifikasi dan jenis Arsip, klasifikasi keamanan Arsip Dinamis, dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis di Komisi.

9. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi maupun pelaksanaan dukungan administrasi sekretariat jenderal Komisi.
10. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
11. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum yang akan menimbulkan kerugian terhadap kerahasiaan, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
13. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
14. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokkan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
15. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
16. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Komisi.

Pasal 2

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan pedoman dalam penggunaan, pengamanan dan hak akses Arsip Dinamis di lingkungan Komisi.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi mencakup :

- a. klasifikasi Arsip;
- b. jenis Arsip;
- c. klasifikasi keamanan Arsip;
- d. hak akses;
- e. dasar pertimbangan; dan
- f. Unit pengolah.

Pasal 4

- (1) Arsip yang tercipta di Komisi dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; dan
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan tingkat keamanan dan hak akses terhadap Arsip.
- (3) Arsip Dinamis Komisi yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa atau Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Komisi apabila diketahui oleh masyarakat umum.
- (4) Arsip Dinamis Komisi yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Komisi atau memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi apabila diketahui oleh masyarakat umum.
- (5) Arsip Dinamis Komisi yang termasuk ke dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumberdaya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi atau menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
- (6) Arsip Dinamis Komisi yang termasuk ke dalam kategori Arsip Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya mengandung dampak yang luas hingga mengganggu keamanan dan keselamatan negara apabila diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

- (1) Dalam Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, pengguna internal di lingkungan Komisi yang berhak antara lain:
 - a. ketua, wakil ketua dan anggota Komisi dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka;
 - b. pejabat struktural eselon I dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka;
 - c. pejabat struktural eselon II dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka;
 - d. pejabat struktural eselon III dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Terbatas, dan Biasa/Terbuka;
 - e. pejabat struktural eselon IV dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Terbatas, dan Biasa/Terbuka; dan
 - f. satuan pengawasan internal dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka.
- (2) Dalam Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, pengguna eksternal yang berhak antara lain:
 - a. publik hanya dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Biasa/Terbuka;
 - b. pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat mengakses seluruh data dan/atau informasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas pengawasannya; dan
 - c. aparat penegak hukum dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka.
- (3) Hak akses data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi disimpan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filig cabinet* pada masa aktif dan rak Arsip pada masa inaktif untuk menyimpan Arsip biasa atau terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk menyimpan Arsip rahasia dan sangat rahasia.
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif;
 - c. buku peminjaman Arsip.
- (4) Penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas pengamanan.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Arsip konvensional dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat/derajat klasifikasinya dilakukan melalui prosedur pengiriman antara lain:
 - a. Biasa/Terbuka, tidak ada persyaratan prosedur khusus;
 - b. Terbatas, dalam amplop bersegel;
 - c. Rahasia, menggunakan warna kertas yang berbeda, diberi kode rahasia, menggunakan amplop dobel, amplop segel, stempel rahasia, konfirmasi tanda terima, harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen rahasia;
 - d. Sangat Rahasia, menggunakan warna kertas yang berbeda, menggunakan amplop dobel bersegel, audit jejak untuk setiap titik akses (tanda tangan), harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen rahasia.
- (2) Penyampaian Arsip elektronik dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat/derajat klasifikasinya dilakukan melalui prosedur pengiriman antara lain :
 - a. Biasa/ Terbuka, tidak ada persyaratan prosedur khusus;
 - b. Terbatas, apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, *password*, dan lain-lain;
 - c. Rahasia, harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email, menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia, menggunakan persandian atau kriptografi;
 - d. Sangat Rahasia, harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email, menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia, menggunakan persandian atau kriptografi, harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat fungsional arsiparis atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris jenderal Komisi.

Pasal 9

Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi ini.

Pasal 10

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN :

PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
I. FASILITATIF							
A.	PR	PERENCANAAN					
	PR.01	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KPPU					
	PR.01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) KPPU					
	PR.01.03	Rencana Strategis (Renstra)					
	PR.02	Rencana Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.02.01	Usulan unit kerja dan satuan kerja beserta data pendukung					
	PR.02.02	Penelaahan usulan unit kerja					
	PR.02.03	Program Kerja Tahunan					
	PR.03	Perencanaan Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.03.01	Pagu Indikatif <ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Bersama (SEB) - Surat pembahasan pengalokasian anggaran pagu indikatif - TOR dan RAB unit kerja - Formulir pagu indikatif - Dokumen <i>trilateral meeting</i> 					
	PR.03.02	Pagu Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Bersama (SEB) - Surat pembahasan pengalokasian anggaran pagu - TOR dan RAB unit kerja - Formulir pagu anggaran - Dokumen <i>trilateral meeting</i> - Surat pengantar pagu anggaran - Rencana kerja anggaran - Formulir 1, 2, 3 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pagu anggaran - Lembar persetujuan DPR RI - Catatan penelaahan pagu anggaran 					
	PR.03.03	Pagu Alokasi Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Bersama (SEB) - Surat pembahasan pengalokasian anggaran pagu - TOR dan RAB unit kerja - Formulir pagu alokasi anggaran - Surat pengantar pagu alokasi anggaran - Rencana kerja anggaran - Formulir 1, 2, 3 - Daftar pagu alokasi anggaran per satker - Lembar persetujuan DPR RI - Catatan penelaahan pagu anggaran - Catatan penelaahan pagu alokasi anggaran - Dokumen KRISNA 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.03.04	Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.03.05	Standar Biaya Khusus (SBK)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.04	Revisi Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.04.01	Revisi DIPA dan POK					
	PR.04.02	Revisi Anggaran yang bersumber dari PNBP					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	PR.05	Dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pengajuan anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.06	Penetapan Kinerja					
	PR.06.01	Pimpinan dan anggota komisi	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.06.02	Pimpinan unit kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.07	Monitoring dan Evaluasi					
	PR.07.01	Monitoring dan evaluasi berkala	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.07.02	Monitorong dan evaluasi program unit kerja dan lembaga					
	PR.07.03	Monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja					
	PR.08	Penyusunan Laporan Kinerja					
	PR.08.01	Laporan Berkala - Laporan kinerja bulanan - Laporan triwulan - Laporan semesteran - Laporan tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.08.02	Laporan Kinerja (LAKIN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	PR.08.03	Laporan <i>Incidental</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
B.	KU	KEUANGAN					
	KU.01	Pelaksanaan Anggaran					
	KU.01.01	Pendapatan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - Surat setoran pajak - Bukti penerimaan negara bukan pajak - Bukti setor bunga/jasa giro bank 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.01.02	Belanja Anggaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> - Barang Habis Pakai 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Barang Inventaris <ul style="list-style-type: none"> a) Barang bergerak 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
		<ul style="list-style-type: none"> b) Barang tak bergerak (tanah/bangunan) 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jasa 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.01.03	Daftar Gaji/Tunjangan/Honorarium	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.01.04	Dokumen Pembayaran Keuangan Negara, berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) beserta data pendukungnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KU.01.05	Laporan Realisasi Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.01.06	Pengembalian Belanja <ul style="list-style-type: none"> - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.02	Dokumen Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara pemeriksaan kas - Kas/register penutupan kas - Arsip data komputer - Berita cara rekonsiliasi antara satuan kerja dan KPPN 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.03	Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.04	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.05	Bantuan atau Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	KU.06	Pertanggungjawaban Keuangan Negara <ul style="list-style-type: none"> - LHP BPK atas Laporan Keuangan - Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Perencanaan dan Keuangan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
C.	HK	HUKUM					
	HK.01	Program Legislasi - Naskah urgensi - Naskah akademik	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
	HK.02 HK.02.01	Produk Hukum Produk hukum internal (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum): - Peraturan KPPU - Keputusan KPPU - Pedoman - Petunjuk pelaksanaan - Instruksi - Prosedur tetap (Protap) - Standar operasional prosedur (SOP) - Surat edaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
	HK.02.01	Produk hukum eksternal (UU, PP, Keppres dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
	HK.03	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
	HK.04	Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
	HK.05 HK.05.01 HK.05.02 HK.05.03 HK.05.04	Telaah Hukum Telaah hukum internal Telaah hukum eksternal Telaah hukum perjanjian/kerja sama Telaah hukum akta	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	HK.06	Sosialisasi produk hukum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
	HK.07	Kasus Hukum Perdata/Pidana	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hukum	
D.	OT	ORGANISASI DAN TATALAKSANA					
	OT.01	Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPPU	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum/ Biro Hukum	
	OT.01.01	Pembentukan, pengembangan/pembubaran organisasi					
	OT.01.02	Analisis Organisasi					
	OT.01.03	Evaluasi Kelembagaan					
	OT.02	Analisis Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	OT.02.01	Analisis Jabatan Struktural					
	OT.02.02	Analisis Jabatan Fungsional					
	OT.02.03	Analisis Jabatan Pelaksana					
	OT.03	Standar Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	OT.03.01	Standar Kompetensi Jabatan Struktural					
	OT.03.01	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional					
	OT.03.01	Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana					
	OT.04	Analisis Beban Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	OT.05	Tata Laksana	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum/ Biro Hukum	
	OT.05.01	Penetapan dan Penyelarasan SOP					
	OT.05.02	Tata Hubungan Kerja					
	OT.06	Reformasi Birokrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro SDM dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
E.	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT & KEPROTOKOLAN					
	HM.01	Keprotokolan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.01.01	Penyelenggaraan acara kedinasan <ul style="list-style-type: none"> - Upacara bendera - Upacara hari besar - Upacara pelantikan - Serah terima jabatan - Peresmian - Seremonial lainnya 					
	HM.01.02	Dokumen penerimaan tamu Anggota Komisi <ul style="list-style-type: none"> - Buku tamu - Daftar alamat 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.01.03	Agenda kegiatan Anggota Komisi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.01.04	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri <ul style="list-style-type: none"> - Anggota komisi - Pejabat lain/pegawai 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.02	Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.02.01	Publikasi eksternal					
	HM.02.01	Publikasi internal					
	HM.03	Hubungan Antar-Lembaga	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.03.01	Lembaga Pemerintah					
	HM.03.02	Organisasi Sosial/LSM					
	HM.03.03	Perusahaan					
	HM.03.04	Perguruan Tinggi					
	HM.03.05	Media Massa <ul style="list-style-type: none"> - Siaran pers/konferensi pers/<i>press release</i> /wawancara - Kunjungan wartawan/peliputan 					
	HM.03.06	Forum Kehumasan (Bakohumas)					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	HM.04	Hearing DPR	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.05	Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.06	Penghargaan dan Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.07	Pemberian Ucapan (terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, permohonan maaf)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.08	Pengumpulan, Pengolahan Informasi (kliping Koran, brosur, leaflet, poster, plakat dan pengumuman) dan Penyajian Informasi Kelembagaan/PPID	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.09	Pendokumentasian/liputan kegiatan KPPU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	HM.10	Penerbitan majalah, buletin, jurnal KPPU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
F.	KS	KERJA SAMA					
	KS.01	Kerja Sama Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	KS.01.01	Korespondensi					
	KS.01.02	Penyusunan naskah kerja sama					
	KS.01.03	Telaah/kajian pertimbangan hukum					
	KS.01.04	Risalah rapat pembuatan MoU					
	KS.01.05	Naskah MoU					
	KS.01.06	Berkas penandatanganan					
	KS.02	Kerja Sama Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	KS.02.01	Korespondensi					
	KS.02.02	Penyusunan naskah kerja sama					
	KS.02.03	Telaah/kajian pertimbangan hukum					
	KS.02.04	Risalah rapat pembuatan MoU					
	KS.02.05	Naskah MoU					
	KS.03	Kerja Sama Bantuan Teknis dan Hibah dengan Organisasi Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	KS.04	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama <ul style="list-style-type: none"> - data dan informasi - peningkatan kapasitas SDM - penelitian bersama 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	
	KS.05	Database dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri - Dokumen Perjanjian Perdagangan Internasional dan Nota Kesepahaman Luar Negeri 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
G.	KT	KEPUSTAKAAN					
	KT.01	Penyimpanan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Perpustakaan	
	KT.01.01	Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit					
	KT.01.02	Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka					
	KT.02	Pengelolaan Bahan Pustaka - Buku induk koleksi - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan - Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah - Daftar pengiriman bahan pustaka surplus - Lembar kerja pengolahan BP (buram pengkatalogan) - <i>Shelt List</i> atau jajaran kartu utama (<i>master list</i>) - Daftar buku tambahan (<i>asseccion list</i>) - Daftar atau jajaran kendali (<i>subjek dan pengarang</i>)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Perpustakaan	
	KT.03	Layanan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Perpustakaan	
	KT.03.01	Layanan peminjaman					
	KT.03.02	Pengunjung					
	KT.03.03	Layanan rujukan					
	KT.03.04	Keanggotaan					
	KT.03.05	Layanan silang layang					
H.	KP	KEPEGAWAIAN/SDM					
	KP.01	Bezetting atau Persediaan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KP.02 KP.02.01	Pengadaan Pegawai Penerimaan Pegawai 1) Pengumuman 2) Seleksi administrasi 3) Pemanggilan peserta 4) Pelaksanaan ujian tertulis 5) Keputusan hasil ujian 6) Wawancara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.02.02	Penetapan Pengumuman kelulusan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.02.03	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.02.04	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP - Surat Lamaran - Ijazah - SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) - Kartu kuning - Surat keterangan kesehatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.02.05	Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 tahun	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.02.06	Surat Keputusan Penetapan Calon Pegawai KPPU	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03 KP.03.01	Pembinaan Pegawai Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai - Memo Dinas - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin - Laporan Kegiatan - Sertifikat/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KP.03.02	Ujian Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03.03	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03.04	Pakta Integritas Pejabat Struktural	Terbatas	Eselon I	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03.05	Bimbingan Rohani - Pembekalan Masa Persiapan Pensiun	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03.06	Disiplin Pegawai - Daftar hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03.07	Berkas Hukuman Displin Pegawai - Konseling pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.03.08	Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.04	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.05 KP.05.01	Mutasi Pegawai Diperbantukan atau Dipekerjakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KP.05.02	Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.05.03	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.05.04	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional berdasarkan peraturan KPPU	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.05.05	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.05.06	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.05.07	Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.06	Fasilitasi Magang Kerja Eksternal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.07	Piutang Ikatan Dinas	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.08	Administrasi Pegawai					
	KP.08.01	Daftar Nominatif Pengajuan Pengurusan Gaji	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KP.08.02	Cuti Pegawai (cuti tahunan/cuti sakit/cuti besar/cuti melahirkan/cuti tugas belajar/cuti alasan penting/cuti di luar tanggungan negara)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.08.03	Dokumentasi Identitas Pegawai <ul style="list-style-type: none"> - Kartu pegawai KPPU - Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan - Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.08.04	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.08.05	Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.09	Kesejahteraan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.09.01	Berkas Layanan Asuransi Pegawai					
	KP.09.02	Berkas Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai					
	KP.09.03	Berkas Layanan Bantuan Sosial					
	KP.09.04	Berkas Layanan Kedukaan					
	KP.09.05	Berkas tentang Layanan Olahraga dan rekreasi					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KP.10	Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntugan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.11	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KP.12	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
		Berkas Perseorangan Pegawai : - Berkas Lamaran yang diterima - Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya - Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN - S.K. Pengangkatan CPNS - Hasil Pengujian Kesehatan - S.K. Pengangkatan PNS - S.K. Peninjauan Masa Kerja - S.K. Kenaikan Pangkat - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan - S.K.Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional - S.K.Perpindahan Wilayah Kerja - S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Berita Acara Pemeriksaan - S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS - S.K.Pemberian Uang Tunggu - S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat - SK. Pengalihan PNS	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - S.K.Pemberhentian sebagai PNS - S.K.Pemberhentian Sementara - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Akta Nikah/Akta Cerai - Akta Kelahiran - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan - Surat Keterangan Mutasi Keluarga - Surat Keterangan Meninggal Dunia - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/Izin Belajar Dalam dan Luar Negeri - Ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - Surat Pertimbangan Status PNS - SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 					
		<ul style="list-style-type: none"> - SK Pensiun - Kartu keluarga - Buku Rekening Tabungan 					
		Berkas Perseorangan Pejabat Negara <ul style="list-style-type: none"> - Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha 	Terbatas	Eselon I	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang 	Terbatas	Eselon I	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
I.	PL	PERLENGKAPAN					
	PL.01	Pengadaan Barang dan Jasa					
	PL.01.01	Perencanaan pengadaan barang dan jasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	PL.01.02	Pelaksanaan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	PL.02	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	PL.03	Pengelolaan Barang					
	PL.03.01	Penatausahaan BMN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	PL.03.02	Monitoring BMN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	PL.03.03	Penghapusan BMN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	PL.03.04	Dokumen kepemilikan aset atau kekayaan KPPU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
J.	RT	KERUMAHTANGGAAN					
	RT.01	Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	RT.02	Penggunaan Fasilitas Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	RT.02.01	Peminjaman kendaraan dinas					
	RT.02.02	Peminjaman ruangan rapat/konsumsi					
	RT.02.03	Fasilitas kantor lainnya					
	RT.03	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	RT.03.01	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas					
	RT.03.02	Pemeliharaan dan perbaikan					
	RT.03.03	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan					
	RT.04	Layanan Perkantoran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	RT.04.01	Pertamanan/landscaping dan penghijauan					
	RT.04.02	Dokumen layanan kebersihan					
	RT.04.03	Dokumen layanan operasional (langganan, perbaikan, dan perawatan)					
	RT.05	Pengelolaan Jaringan listrik, Air, Telepon, dan peralatan kantor lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	RT.05.01	Perbaikan/pemeliharaan					
	RT.05.02	Pemasangan					
	RT.05.03	Peminjaman peralatan kantor					
	RT.06	Pengamanan <ul style="list-style-type: none"> - Daftar nama satuan pengamanan - Jadwal Piket - <i>Back up</i> kamera pengawas - Dokumen data pengunjung atau tamu - Berita acara pengamanan - Laporan kehilangan 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan gangguan - Laporan kerusakan - Laporan kecelakaan - Surat izin keluar masuk orang atau barang 					
K.	TU	TATA USAHA					
	TU.01 TU.01.01 TU.01.02	Layanan Pimpinan Kegiatan Kunjungan Dinas Menghadiri undangan kedinasan, rapat, dan lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	TU.02 TU.02.01	Dokumen Rapat Pimpinan/Setjen/Kedeputian Rapat Komisi/Pimpinan/Pengarah <ul style="list-style-type: none"> - Undangan rapat - Bahan rapat - Daftar hadir - Notula, risalah rapat, keputusan - Berita acara rapat (jika ada) 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Sekretaris Jenderal/ Deputi Penegakan Hukum/Deputi Kajian dan Advokasi	
	TU.02.02	Rapat Koordinasi/Rapat Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Undangan rapat - Bahan rapat - Daftar hadir - Notula, risalah rapat, keputusan - Berita acara rapat (jika ada) 	Terbatas	Eselon I	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Sekretaris Jenderal/ Deputi Penegakan Hukum/Deputi Kajian dan Advokasi	
	TU.03	Rapat Staf <ul style="list-style-type: none"> - Undangan rapat - Bahan rapat - Daftar hadir - Notula, risalah rapat, keputusan 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	TU.04	Rumah Tangga dan Protokoler Pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
L.	KA	KEARSIPAN					
	KA.01	Persuratan - buku agenda/kartu kendali - lembar pengantar/buku ekspedisi/formulir penggandaan dsb	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.02	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip - Daftar Arsip Aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas), Daftar arsip inaktif, Daftar arsip vital - Berkas Fumigasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.03	Persetujuan dan penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.04	Alih Media Arsip - Berita Acara Alih Media Arsip - Daftar arsip yang dialihmediakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.05	Layanan Arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.06 KA.06.01	Penyusutan Arsip Pemindahan Arsip inaktif - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.06.02	Pemusnahan Arsip - Panitia pemusnahan arsip - Notula rapat panitia penilai - Surat persetujuan Kepala ANRI - Surat keputusan pemusnahan - Berita acara pemusnahan - Daftar arsip yang dimusnahkan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KA.06.03	Penyerahan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan panitia penilai - Notula rapat panitia penilai - Surat pertimbangan panitia penilai - Surat persetujuan Kepala ANRI - Surat pernyataan Ketua KPPU bahwa arsip autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan - Surat penetapan penyerahan - Berita acara penyerahan arsip - Daftar arsip yang diserahkan 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.07	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	
	KA.07.01	Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan					
	KA.07.02	Bimbingan Teknis					
	KA.07.03	Supervisi atau Monitoring					
	KA.07.04	Pengawasan Kearsipan Internal					
M.	PD	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	PD.01	Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Pendidikan dan Pelatihan	
	PD.01.01	Penyusunan Pedoman kediklatan pendidikan dan pelatihan (diklat)					
	PD.01.02	Penyusunan Kurikulum diklat					
	PD.01.03	Penyusunan Modul diklat					
	PD.02	Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Pendidikan dan Pelatihan	
	PD.02.01	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan					
	PD.02.02	Kursus/Diklat Teknis					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	PD.03	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Pendidikan dan Pelatihan	
N.	DI	DATA DAN INFORMASI					
	DI.01	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Data dan Informasi	
	DI.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi, Sistem Aplikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Data dan Informasi	
	DI.03	Layanan Website	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Data dan Informasi	
	DI.04	Perekaman dan pemutakhiran data	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Data dan Informasi	
	DI.05	Migrasi sistem aplikasi dan data	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Data dan Informasi	
	DI.06	Dokumen hosting	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Unit Data dan Informasi	
O.	PI	PENGAWASAN INTERNAL					
	PI.01	Rencana Pengawasan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Satuan Pengawasan Internal	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	PI.02	Pelaksanaan Pengawasan (Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan)	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Satuan Pengawasan Internal	
	PI.02.01	Pelaksanaan Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut					
	PI.02.02	Pelaksanaan Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut					
	PI.02.03	Pelaksanaan pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dan mengandung unsur tindak pidana korupsi					
	PI.03	Laporan Harta Kekayaan (LHKPN dan LHKASN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Satuan Pengawasan Internal	
	PI.04	Ganti Rugi Aset	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Satuan Pengawasan Internal	
II. SUBSTANTIF							
A.	EM	EKONOMI (KAJIAN PERILAKU PELAKU USAHA)					
	EM.01	Pengkajian/Penelitian Inisiatif dan Pemantauan Pelaku Usaha	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Ekonomi	
	EM.01.01	Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja atau TOR; - SK untuk satuan tugas; - MoU dengan pihak swakelola; - Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swakelola; - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pihak swakelola; - Risalah rapat dengan pelaku usaha. 					
	EM.01.02	Pengumpulan Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - studi literatur; - data pihak terkait; - undangan diskusi/FGD; - daftar hadir diskusi; - risalah diskusi; - dokumen keuangan; - risalah narasumber; - data stakeholder; - dokumentasi penelitian lapangan; - dokumentasi lainnya. 					
	EM.01.03	Pengolahan Data dan Informasi;					
	EM.01.04	Analisis Kebijakan;					
	EM.01.05	Laporan Hasil Kajian Pelaku Usaha.					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	EM.02 EM.02.01	Pengembangan Indeks Persaingan Usaha Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Rencana kerja atau TOR; - SK untuk satuan tugas; - MoU dengan pihak swakelola; - Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swakelola; - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pihak swakelola; - dokumen keuangan 					
	EM.02.02	Pengumpulan Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - studi literatur; - data pihak terkait; - data stakeholder; - Kuesioner indeks persaingan usaha; - Responden terkait <i>indepth interview</i> indeks persaingan usaha; - - dokumentasi penelitian lapangan; - dokumentasi lainnya; - Koordinasi dengan kantor wilayah. 	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Direktorat Ekonomi	
	EM.02.03	Pengolahan Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - daftar hadir diskusi/FGD; - risalah diskusi; 					
	EM.02.04	Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha;					
	EM.02.05	Ringkasan Eksekutif (<i>executive summary</i>) Indeks Persaingan Usaha.					
B.	KB	KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA					
	KB.01 KB.01.01	Evaluasi Kebijakan Persaingan usaha Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Rencana kerja atau TOR; - SK untuk satuan tugas; - MoU dengan pihak swakelola; - Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swakelola; - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pihak swakelola; - Risalah rapat. 					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KB.01.02 KB.01.03 KB.01.04 KB.01.05 KB.01.06	Pengumpulan Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - studi literatur; - data pihak terkait; - undangan rapat; - daftar hadir diskusi/FGD; - risalah diskusi; - dokumen keuangan; - risalah narasumber; - data stakeholder; - dokumentasi penelitian lapangan; - dokumentasi lainnya. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Pengolahan Data dan Informasi Analisis Kebijakan Pembuatan Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan, termasuk Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Kebijakan Persaingan	
	KB.02 KB.02.01 KB.02.02	Kajian Penyusunan Kebijakan Persaingan dan Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Tema usulan kajian kebijakan; - Rencana Kerja/TOR; - Inventarisasi kebijakan. Kegiatan kajian yang dilakukan swakelola <ul style="list-style-type: none"> - Proposal dari pihak ketiga; - Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; - SK satuan tugas; - Risalah rapat. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Kebijakan Persaingan	
	KB.02.03 KB.02.04 KB.02.05 KB.02.06 KB.02.07	Pengumpulan Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - studi literatur; - data pihak terkait; - undangan FGD; - daftar hadir diskusi; - risalah diskusi - dokumen keuangan; - risalah narasumber; - data <i>stakeholder</i>; - dokumentasi penelitian lapangan; - dokumentasi lainnya. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Pengolahan Data dan Informasi Analisis Kebijakan Pembuatan Laporan Hasil Kajian Kebijakan, termasuk Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Kebijakan Persaingan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	KB.03 KB.03.01 KB.03.02 KB.03.03 KB.03.04	Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Permintaan tanggapan terkait kebijakan pemerintah Kegiatan diskusi/FGD Laporan Hasil Diskusi/FGD Saran pertimbangan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Direktorat Kebijakan Persaingan	
	KB.04 KB.04.01 KB.04.02 KB.04.03	Pengembangan dan Implementasi Daftar Periksa Persaingan Usaha Dokumen modul penjelasan daftar periksa assesmen kebijakan persaingan usaha (AKPU); Dokumen Permohonan dan Isian Kuesioner AKPU kepada Kementerian/ Lembaga; Dokumen undangan koordinasi kepada kanwil terkait pengisian kuesioner AKPU.	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Direktorat Kebijakan Persaingan	
C.	AD	ADVOKASI PERSAINGAN DAN KEMITRAAN					
	AD.01 AD.01.01 AD.01.02	Advokasi Persaingan Usaha Pelaku usaha/pemerintah/pendidikan/praktisi hukum/masyarakat, dan lain-lain. Kegiatan meliputi : lokakarya dosen persaingan usaha, seminar persaingan usaha, workshop hakim. Persiapan - Modul advokasi; - Kerangka acuan kerja (KAK); - Memo koordinasi dengan eselon II lain; - Risalah rapat internal; - Presentasi pada rapat kerja; - Memo kepada ketua komisi terkait penunjukan nama - Surat perintah dari Ketua Komisi; - Surat undangan. Pelaksanaan Advokasi - Daftar hadir; - Materi advokasi; - Lembar evaluasi; - Laporan kegiatan advokasi persaingan usaha.	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Direktorat Advokasi Persaingan & Kemitraan	
	AD.02	Advokasi Kemitraan Pelaku usaha/pemerintah/pendidikan/praktisi hukum/masyarakat, dan lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja	Direktorat Advokasi Persaingan &	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	AD.02.01 AD.02.02	Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Modul advokasi; - Kerangka acuan kerja; - Memo koordinasi dengan eselon II lain; - Risalah rapat internal; - Presentasi pada rapat kerja; - Memo kepada ketua komisi terkait penunjukan nama - Surat perintah ketua komisi; - Surat undangan; Pelaksanaan Advokasi <ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir; - Materi advokasi; - Lembar evaluasi; - <u>Laporan kegiatan advokasi persaingan usaha.</u> 			KPPU	Kemitraan	
	AD.03 AD.03.01 AD.03.02	Program Kepatuhan Persaingan Usaha (Identifikasi dan scheduling (melakukan identifikasi pelaku usaha besar dan dominan terutama yang terkait putusan perkara) Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka Acuan Kerja. - SK satuan tugas. Rapat Program Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir; - Risalah Rapat dengan Pelaku Usaha; - Risalah Rapat Koordinasi eselon II; 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Advokasi Persaingan & Kemitraan	
	AD.03.03 AD.03.04 AD.03.05 AD.03.06 AD.03.07 AD.03.09	Rapat Tindak Lanjut Rapat Program Kepatuhan terhadap Pelaku Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan Permohonan Program Kepatuhan; - Memo kepada Ketua Komisi terkait penunjukan nama - Memo kepada humas & kerjasama untuk peliputan. Koordinasi dengan Kantor Wilayah; Pelaksanaan Sosialisasi <ul style="list-style-type: none"> - Memo/surat untuk mengundang pembicara/narasumber (baik - Materi sosialisasi; - Daftar hadir; - Lembar evaluasi; - Laporan kegiatan. Penetapan Program Kepatuhan (penetapan Majelis Komisi); Rapat Komisi jika usulan berdasarkan inisiatif Komisi <ul style="list-style-type: none"> - Memo koordinasi awal dengan kanwil, jika akan dilakukan di wilayah kanwil; - Memo koordinasi dengan Biro Hukum jika usulan program kepatuhan tersebut berdasarkan mandatory putusan. Pemantauan program kepatuhan kepada pelaku usaha.					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	AD.04 AD.04.01 AD.04.02 AD.04.03	Pengembangan Modul Persiapan - Kerangka acuan kerja. - Risalah rapat kerja dengan eselon II lain; - Referensi modul; - SK satuan tugas; - Memo koordinasi dengan eselon II lain. Pelaksanaan - Surat undangan narasumber; - Risalah rapat dengan narasumber; - Surat permohonan tenaga ahli; - Dokumen pertanggungjawaban tenaga ahli; - Modul baru; - Laporan akhir kegiatan pengembangan modul; - Presentasi pengembangan modul. Penetapan Modul	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Direktorat Advokasi Persaingan & Kemitraan	
D.	IN	INVESTIGASI					
	IN.01 IN.01.01 IN.01.02	Klarifikasi Laporan Pelanggaran Persaingan Usaha Persiapan - Laporan dari masyarakat; - Memo pemberitahuan laporan yang diterima Kantor Wilayah; - SK Tim Satuan Tugas Klarifikasi Laporan; Kegiatan Klarifikasi - Surat undangan klarifikasi; - Surat permintaan dokumen; - Berita Acara Klarifikasi; - Daftar hadir; - Memo kegiatan klarifikasi; - kelengkapan dokumen lainnya; - Memo undangan rapat dan notula rapat (internal); - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan hasil klarifikasi: laporan, daftar simak, abstraksi, disposisi pimpinan; - Memo penyampaian laporan hasil klarifikasi dari koordinator - Materi presentasi hasil klarifikasi laporan; - Surat pemberitahuan perkembangan laporan; - Memo pelimpahan laporan hasil klarifikasi ke unit lain (Jika ditindaklanjuti);	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Deputi Penegakan Hukum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	IN.01.03	Pelimpahan laporan hasil klarifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara pelimpahan laporan hasil klarifikasi; - laporan hasil klarifikasi. - dokumen pendukung (Jika ditindaklanjuti); - <u>Dokumen tambahan</u> (jika dibutuhkan oleh satgas/investigator). 					
	IN.02 IN.02.01 IN.02.02 IN.02.03	<p>Penelitian Perkara Inisiatif</p> <p>Sumber penelitian perkara Inisiatif termasuk dari kantor wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil monitoring pelaku usaha; - Laporan evaluasi kebijakan; - Laporan pengawasan penggabungan/peleburan/merger; - Laporan pengambilalihan/akuisisi saham/aset; - Laporan pembentukan usaha patungan. <p>Persiapan Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK tim satuan tugas penelitian perkara inisiatif; - Surat undangan diskusi; - Surat permintaan dokumen; - Surat undangan diskusi <p>Kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risalah hasil diskusi; - Daftar hadir; - kelengkapan dokumen lainnya (KTP, Surat Kuasa, Surat Tugas, Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - <u>Laporan hasil penelitian perkara inisiatif;</u> 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Deputi Penegakan Hukum	
	IN.02.04	<ul style="list-style-type: none"> - Memo penyampaian laporan hasil penelitian perkara inisiatif - Materi presentasi hasil penelitian perkara inisiatif dalam rapat <p>Pelimpahan laporan hasil klarifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara pelimpahan laporan hasil klarifikasi; - laporan hasil klarifikasi; - <u>dokumen pendukung;</u> 					
	IN.03 IN.03.01 IN.03.02	<p>Penyelidikan</p> <p>Sumber penyelidikan (termasuk dari Kanwil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil klarifikasi/ penelitian perkara inisiatif. <p>Persiapan Penyelidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Satuan tugas penyelidikan. 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif. hilangnya	Deputi Penegakan Hukum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	MA.02 MA.02.01	Konsultasi Badan Usaha Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Formulir konsultasi; - Surat kuasa; - Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; - Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah gabung; - Anggaran Dasar; - Profil badan usaha; - Ringkasan penggabungan; - Rencana bisnis; - Analisis dampak penggabungan; - Tanda terima yang memuat nomor registrasi konsultasi. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Merger dan Akuisisi	
	MA.02.02	Kegiatan Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> - surat undangan konsultasi; - daftar hadir; - risalah rapat; - kelengkapan dokumen; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan hasil konsultasi. 					
	MA.02.03	Kegiatan konsultasi yang tidak masuk tahap penilaian <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Komisi Tidak Wajib Notifikasi; - BAST (Berita Acara Serah Terima). 					
	MA.03 MA.03.01	Notifikasi Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Formulir A1; - Surat Kuasa; - Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; - Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah gabung; - Anggaran Dasar; - Profil Badan Usaha; - Dokumen yang menunjukkan berlaku efektif secara yuridis; - Ringkasan penggabungan; - Rencana bisnis; - Analisis dampak penggabungan; - Tanda terima yang memuat nomor registrasi konsultasi; 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Merger dan Akuisisi	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	MA.03.02	<ul style="list-style-type: none"> - Surat undangan klarifikasi; - Daftar hadir, risalah rapat dan kelengkapan dokumen; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan konsultasi Untuk konsultasi yang tidak masuk tahap penilaian <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Komisi Tidak Wajib Notifikasi; - BAST (Berita Acara Serah Terima); 					
	MA.04 MA.04.01	Penelitian Inisiatif dan Penyelidikan Merger dan Akuisisi Penelitian Inisiatif: <ul style="list-style-type: none"> - Berkas Pelaku Usaha; - Dokumen tambahan; - Informasi dari masyarakat, berita media massa, surat resmi dari instansi pemerintah, sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Merger dan Akuisisi	
	MA.04.02	Kegiatan Penyelidikan Merger dan Akuisisi <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan atau penelitian inisiatif merger dan akuisisi; - SK Tim Satuan tugas penyelidikan merger dan akuisisi; - Surat panggilan; - Surat permintaan dokumen; - Surat permintaan keterangan pemerintah; - Surat permintaan keterangan ahli; - Surat pemberitahuan penyelidikan lapangan. - Berita acara penyelidikan - Daftar hadir - kelengkapan dokumen lainnya; - Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat Tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan hasil penyelidikan merger dan akuisisi 					
	MA.04.03	Penyampaian laporan hasil penyelidikan ke Direktorat Penindakan <ul style="list-style-type: none"> - Memo penyampaian laporan hasil penyelidikan ke pemberkasan - Materi presentasi hasil penyelidikan; - Berita Acara pelimpahan laporan hasil penyelidikan; - Surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan; - Dokumen tambahan; - Laporan hasil penvelidikan dan dokumen pendukung. 					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	MA.05 MA.05.01	Penilaian Merger dan Akuisisi Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Formulir A1; - Surat Kuasa; - Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; - Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah - Anggaran Dasar; - Profil Badan Usaha; - Dokumen yang menunjukkan berlaku efektif secara yuridis; - Ringkasan penggabungan; - Rencana bisnis; - Analisis dampak penggabungan; - Tanda terima yang memuat nomor registrasi konsultasi; - Surat undangan klarifikasi. 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Deputi Penegakan Hukum	
	MA.05.02 MA.05.03	Kegiatan Penilaian Merger dan Akuisisi <ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir; - risalah rapat; - kelengkapan dokumen lainnya; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan penilaian. Kegiatan notifikasi tidak masuk penilaian <ul style="list-style-type: none"> - Ketetapan Komisi Tidak Wajib Notifikasi; - BAST (Berita Acara Serah Terima). 					
F.	PK	PENGAWASAN KEMITRAAN					
	PK.01 PK.01.01 PK.01.02	Pengawasan Kemitraan Persiapan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Berkas dari pelaku usaha; - Korespondensi meliputi koordinasi dengan instansi terkait; - Naskah perjanjian kerja sama; - Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas. Laporan Kegiatan pengawasan dan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	
	PK.02 PK.02.01	Klarifikasi Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari masyarakat; - Memo pemberitahuan laporan yang diterima kantor wilayah; - SK Tim Satgas Klarifikasi Laporan; - Surat permintaan kelengkapan laporan; - Surat undangan klarifikasi; - Surat permintaan dokumen. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	PK.02.02	Kegiatan klarifikasi <ul style="list-style-type: none"> - berita acara klarifikasi; - memo kegiatan klarifikasi; - daftar hadir; - kelengkapan dokumen lainnya; - Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan hasil klarifikasi Laporan Pelanggaran Pelaksanaan - Memo penyampaian laporan hasil klarifikasi dari kantor - Materi presentasi hasil klarifikasi laporan; - Surat pemberitahuan perkembangan laporan; - Memo pelimpahan laporan hasil klarifikasi ke unit lain. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	
	PK.03 PK.03.01	Perumusan Usulan Perkara Inisiatif Kemitraan Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pengawasan kemitraan; - Kesimpulan rapat komisi atau rapat koordinasi; - Memo pemberitahuan perkara inisiatif kemitraan yang diterima - SK Tim Satgas Penelitian Perkara Inisiatif Kemitraan; - Surat undangan diskusi; - Surat permintaan dokumen. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	
	PK.03.02	Kegiatan Perumusan Penelitian Perkara Inisiatif kemitraan <ul style="list-style-type: none"> - risalah hasil diskusi; - daftar hadir; - kelengkapan dokumen lainnya; - Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan hasil perumusan/ penelitian perkara inisiatif - Materi presentasi hasil penelitian perkara inisiatif. 					
	PK.04 PK.04.01 PK.04.02	Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil klarifikasi atau laporan hasil penelitian perkara - SK Tim Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I; - Surat panggilan; - Surat permintaan dokumen; - Surat permintaan keterangan pemerintah; - Surat permintaan keterangan ahli; - Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan; Kegiatan Pemeriksaaan Pendahuluan Tahap I <ul style="list-style-type: none"> - berita acara pemeriksaan; - daftar hadir; - kelengkapan dokumen lainnya; - Surat undangan rapat dan notulen rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	PK.04.03	Penyampaian hasil Pemeriksaan Tahap I <ul style="list-style-type: none"> - Memo penyampaian hasil Pemeriksaan Tahap I dari Kantor Wilayah; - Materi presentasi hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan Tahap I. 					
	PK.05 PK.05.01	Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap II Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan; - SK Tim Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II; - Surat panggilan; - Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran - Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Materi presentasi hasil pemeriksaan Tahap II; - Kesimpulan rapat komisi atau rapat koordinasi atas rekomendasi Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II; - Surat penyampaian peringatan tertulis; - Surat Peringatan Tertulis I. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	
	PK.05.02	Kegiatan Peringatan Tertulis <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan; - Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan; - Surat undangan rapat dan notula rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas - Materi presentasi hasil pemeriksaan Tahap II; - Kesimpulan rapat komisi atau rapat koordinasi atas rekomendasi Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II; - Surat penyampaian peringatan tertulis; - Surat peringatan tertulis I; - berita acara penyampaian peringatan tertulis - daftar hadir - kelengkapan dokumen lainnya. 					
	PK.06 PK.06.01 PK.06.02	Pemantauan Pelaksanaan Peringatan Tertulis Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - SK tim pemantauan kegiatan peringatan tertulis kemitraan; - Surat undangan permintaan klarifikasi; - Undangan rapat dan notula rapat. Kegiatan Pemantauan <ul style="list-style-type: none"> - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas; - Notula presentasi hasil peringatan tertulis di rapat komisi; - Laporan Hasil Pemantauan Peringatan Tertulis. 	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
7	PK.07 PK.07.01	Pengawasan Hasil Penetapan Kemitraan Sumber <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemantauan Peringatan Tertulis; - Notula rapat komisi atau rapat koordinasi tentang hasil pelaksanaan peringatan tertulis oleh Terlapor dan penerbitan Penetapan Komisi tentang Penghentian Perkara, dan perintah untuk memasukkan penghentian perkara tersebut ke Buku - Surat Penetapan Komisi tentang Penghentian Perkara; - Buku Daftar Pengawasan. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Direktorat Pengawasan Kemitraan	
	PK.07.02	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan hasil penetapan Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> - SK Tim pengawasan hasil penetapan; - Surat panggilan pengawasan hasil penetapan; - undangan rapat dan notulen rapat; - Surat tugas perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas. 					
	PK.07.03	Pelaksanaan pengawasan hasil penetapan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pengawasan Atas Penetapan Kemitraan; - Materi presentasi hasil pengawasan atas penetapan kemitraan di rapat komisi; - Surat Keputusan Penghentian Pengawasan Hasil Penetapan Kemitraan; - Surat penyampaian salinan keputusan penghentian 					
G.	PN	PENINDAKAN					
	PN.01	Penindakan Perkara					
	PN. 01.01	Pemberkasasn Perkara <ul style="list-style-type: none"> - BAST Laporan Hasil Penyelidikan perkara inisiatif dan laporan keterlambatan pemberitahuan beserta berkas dokumen perkara (perkara merger); - Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Keterlambatan Pemberitahuan (Merger); - BAST Berkas Dokumen Perkara dari Direktorat Penindakan ke Panitera. 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Deputi Penegakan Hukum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	PN.01.02	<p>Pelaksanaan Litigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relaas (surat panggilan) sidang pengadilan niaga terkait keberatan putusan KPPU; - Memori keberatan pemohon keberatan; - Berita acara serah terima berkas perkara KPPU dari Panitera ke - Salinan Putusan KPPU; - Berkas Perkara A, mulai dari surat-menyurat sampai SK; - Berkas Perkara B, termasuk berita acara; - Berkas Perkara C, termasuk dokumen perkara; - Berkas Perkara T; termasuk dokumen terlapor; - Berkas Perkara I; termasuk dokumen investigator; - Daftar berkas perkara A, B, C, T, dan I; - Penjelasan putusan KPPU terhadap memori keberatan; - Surat kuasa di tingkat Pengadilan Niaga; - Memo penandatanganan surat kuasa; - Surat permohonan penetapan penggabungan perkara kepada - Surat permohonan penetapan penggabungan perkara kepada - Surat tugas perjalanan dinas; - Laporan perjalanan dinas; - Permohonan penundaan sidang kepada majelis hakim; - Surat penetapan penggabungan perkara oleh Mahkamah - Replik; - Duplik; - Kesimpulan pemohon dan termohon; - Putusan Pengadilan Niaga; - Surat permohonan salinan putusan dari KPPU ke ketua - Relaas penyampaian pernyataan kasasi; - Relaas penyampaian memori kasasi; - Relaas penyampaian kontra memori kasasi; - Surat kuasa di tingkat Mahkamah Agung (kasasi); - Memori kasasi oleh KPPU selaku pemohon kasasi; - Surat kuasa untuk membayar pendaftaran kasasi; - Tanda terima/akta penyampaian memori kasasi; - Memori kasasi terlapor selaku pemohon kasasi; - Kontra memori kasasi oleh terlapor selaku termohon kasasi; - Kontra memori kasasi oleh KPPU selaku termohon kasasi; - Surat penyampaian berkas perkara kasasi dari Pengadilan - Penerimaan dan register berkas perkara kasasi KPPU; - Surat pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas - Relaas pemberitahuan isi putusan kasasi; - Putusan kasasi Mahkamah Agung; - Relass pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali; 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Deputi Penegakan Hukum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Relas penyampaian memori peninjauan kembali; - Memori peninjauan kembali tTerlapor selaku pemohon PK; - Relas panggilan sidang pengadilan negeri untuk pemeriksaan novum peninjauan kembali; - Surat kuasa di tingkat Mahkamah Agung (peninjauan kembali); - Kontra memori peninjauan kembali KPPU selaku Termohon PK; - Tanda terima/akta penyampaian kontra memori kasasi; - Surat penyampaian berkas perkara peninjauan kembali dari - Penerimaan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali KPPU; - Surat pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas - Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung; - Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali; - Surat permohonan salinan putusan peninjauan kembali kepada ketua Pengadilan Niaga; - Berita acara serah terima putusan inkracht kepada unit pelaksana eksekusi. 					
H.	SM	SIDANG MAJELIS (KEPANITERAAN)					
	SM.01	Persidangan Majelis Komisi					
	SM.01.01	Dokumen Pra Pemeriksaan Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan; - Surat Penugasan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan; - Surat Penugasan Panitera Pemeriksaan Pendahuluan; - Surat Penugasan Investigator Penuntutan Pemeriksaan - Surat Penugasan Sekretariat Pemeriksaan Pendahuluan - Berkas Perkara dilampiri Daftar Alat bukti Investigator; - Berita acara serah terima dokumen perkara; 	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Deputi Penegakan Hukum	
	SM.01.02	Dokumen Pemeriksaan Pendahuluan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan; - Surat panggilan - Surat jangka waktu pemeriksaan pendahuluan - Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan; - Daftar saksi dan/atau ahli investigator penuntutan - Daftar saksi dan/atau ahli terlapor (apabila diajukan) - Berita acara pemeriksaan pendahuluan - Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan - Daftar Alat bukti Terlapor beserta Berita Acara Serah Terima - Dokumen pemeriksaan pendahuluan (apabila diajukan); dan - Surat Tugas/Surat Kuasa Terlapor (apabila diperlukan) 					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	SM.01.03	Dokumen Pra Pemeriksaan Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pemeriksaan Lanjutan; - Surat Penugasan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan; - Surat Penugasan Panitera Pemeriksaan Lanjutan; - Surat Penugasan Investigator Penuntutan Pemeriksaan - Surat Penugasan Sekretariat Pemeriksaan Lanjutan. 					
	SM.01.04	Dokumen Pemeriksaan Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> - Surat pemberitahuan pemeriksaan lanjutan; - Surat pemberitahuan jadwal sidang - Surat pemberitahuan saksi ahli - Surat panggilan - Tambahan alat bukti (apabila ada) - Berita acara pemeriksaan lanjutan - Kesimpulan investigator penuntutan - Kesimpulan terlapor (apabila ada) - Daftar berkas perkara beserta kode dokumen (A, B, C, I, dan T). 					
	SM.01.05	Dokumen Musyawarah Majelis Komisi <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Musyawarah Majelis Komisi; - Surat Penugasan Majelis Komisi Musyawarah Majelis Komisi; - Surat Penugasan Panitera Musyawarah Majelis Komisi. - Surat Penugasan Sekretariat Musyawarah Majelis Komisi; - Surat Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi; - Berita Acara Pembacaan Putusan Komisi. 					
	SM.01.06	Dokumen Putusan Komisi <ul style="list-style-type: none"> - Petikan Pemberitahuan Putusan Komisi; - Putusan Komisi - Salinan Putusan Komisi; - Berita acara serah terima putusan Komisi 					
	SM.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Kepaniteraan <ul style="list-style-type: none"> - Memo kegiatan pembinaan; - Notula rapat pembinaan; - Laporan kegiatan pembinaan. 	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja KPPU	Kepaniteraan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
I.	EK	EKSEKUSI					
1	EK.01 EK.01.01 EK.02.01	<p>Eksekusi Putusan KPPU</p> <p>Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memo pemberitahuan perkara KPPU telah diputus dari Kepala Panitera; - Berita Acara Serah Terima Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap dari Kepaniteraan; Salinan Putusan KPPU; - Berita Acara Serah Terima Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Pengadilan Negeri dan/atau Kasasi Mahkamah Agung dari Unit Kerja Litigasi; Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Kasasi Mahkamah Agung; <p>Kegiatan Eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposisi Pimpinan perihal perintah pencatatan piutang denda; - Buku piutang; - Memo kepada Bagian Keuangan perihal putusan berkekuatan hukum tetap; - Memo kepada Bagian Hubungan Masyarakat perihal Daftar Perusahaan yang dilarang mengikuti tender; - Penerbitan Surat Pelaksanaan Putusan I sampai dengan III - Penerbitan Surat Larangan Tender; - Surat pemberitahuan pelaksanaan putusan dari terlapor; - Surat permohonan cicilan denda; - Surat jawaban atas permohonan cicilan denda dari KPPU; - Memo dari Bagian Keuangan hal penerbitan surat keterangan - Penerbitan surat keterangan tanda lunas; - Surat tugas perjalan dinas; - Penerbitan Surat Somasi dan Sosialisasi Piutang Denda; - Penerbitan Surat Permohonan Penetapan Eksekusi kepada - Salinan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri/Pengadilan - Penerbitan Surat pelimpahan Putusan KPPU kepada penyidik - Berita Acara Serah Terima Putusan Peninjauan Kembali - Memo kepada bagian keuangan perihal pengembalian piutang - Surat permohonan keterangan bebas tanggungan berperkara; - Penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara; - Daftar terlapor belum melaksanakan putusan KPPU; - Daftar hitam pelaku usaha. 	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU	Biro Hukum	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH